



PROVINSI JAWA BARAT

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
28. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	4.144.829.706.439,00
2. Belanja	Rp.	<u>4.146.864.586.125,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(2.034.879.686,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	315.160.718.100,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	(312.660.718.100,00)

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp182.921.743.989,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 4.327.751.450.428,00
 - b. Realisasi Rp. 4.144.829.706.439,00**Selisih lebih/ (kurang) Rp (182.921.743.989,00)**
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.485.047.582.403,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 4.631.912.168.528,00
 - b. Realisasi Rp. 4.146.864.586.125,00**Selisih lebih/ (kurang) Rp. (485.047.582.403,00)**

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.302.125.838.414,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. | (304.160.718.100,00) |
| b. Realisasi Defisit | Rp. | (<u>2.034.879.686,00</u>) |
| Selisih lebih/ (kurang) Rp. | | (302.125.838.414,00) |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut ;
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 315.160.718.100,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>315.160.718.100,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang)Rp. | | 0,00 |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 8.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>2.500.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) Rp. | | (8.500.000.000,00) |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp8.500.000.000,000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 304.160.718.100,00 |
| b. Realisasi | Rp. | <u>312.660.718.100,00</u> |
| Selisih lebih/ (kurang) | | Rp. 8.500.000.000,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp.	4.489.084.553.295,65
b. Jumlah kewajiban	Rp.	95.337.243.942,63
c. Jumlah ekuitas	Rp.	4.393.747.309.353,02

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2017	Rp.	315.160.718.100,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	742.870.957.861,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.	(747.405.837.547,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(0,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.		0,00
f. Penurunan Bersih Kas selama periode 2017	Rp.	(4.534.879.686,00)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp.	310.625.838.414,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA – L)
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **30 Agustus 2018**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **30 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : **9** .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA
BARAT (12/113/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENSIH

NIP. 19640501 199003 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	4.327.751.450.428,00	4.144.829.706.439,00	(182.921.743.989,00)	95,77
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.485.641.325.512,00	1.398.309.963.116,00	(87.331.362.396,00)	94,12
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	857.460.900.000,00	774.945.849.107,00	(82.515.050.893,00)	90,38
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.185.470.200,00	75.484.056.978,00	(24.701.413.222,00)	75,34
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.163.449.000,00	8.301.178.628,00	137.729.628,00	101,69
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	519.831.506.312,00	539.578.878.403,00	19.747.372.091,00	103,80
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.779.261.954.916,00	2.693.408.880.213,00	(85.853.074.703,00)	96,91
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.110.523.128.900,00	2.017.808.510.547,00	(92.714.618.353,00)	95,61
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	251.865.730.814,00	196.117.848.601,00	(55.747.882.213,00)	77,87
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	133.723.035.086,00	120.949.158.440,00	(12.773.876.646,00)	90,45
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.239.740.020.000,00	1.239.740.020.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	485.194.343.000,00	461.001.483.506,00	(24.192.859.494,00)	95,01
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	308.974.674.000,00	308.426.264.000,00	(548.410.000,00)	99,82
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	308.974.674.000,00	308.426.264.000,00	(548.410.000,00)	99,82
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	359.764.152.016,00	367.174.105.666,00	7.409.953.650,00	102,06
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	359.764.152.016,00	367.174.105.666,00	7.409.953.650,00	102,06
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	62.848.170.000,00	53.110.863.110,00	(9.737.306.890,00)	84,51
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.942.570.000,00	3.290.431.110,00	(652.138.890,00)	83,46
1.3.3	Pendapatan Lainnya	58.905.600.000,00	49.820.432.000,00	(9.085.168.000,00)	84,58
2	BELANJA	4.631.912.168.528,00	4.146.864.586.125,00	(485.047.582.403,00)	89,53
2.1	BELANJA OPERASI	3.159.659.129.950,00	2.943.343.685.478,00	(216.315.444.472,00)	93,15
2.1.1	Belanja Pegawai	1.760.294.036.300,00	1.622.374.260.419,00	(137.919.775.881,00)	92,16
2.1.2	Belanja Barang	1.330.552.929.732,00	1.258.312.067.259,00	(72.240.862.473,00)	94,57
2.1.5	Belanja Hibah	38.726.280.000,00	38.094.559.800,00	(631.720.200,00)	98,37
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.941.600.000,00	23.418.520.000,00	(5.523.080.000,00)	80,92
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.144.283.918,00	1.144.278.000,00	(5.918,00)	100,00

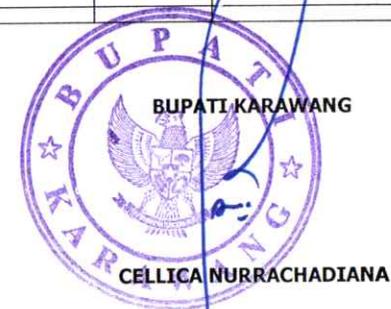
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	976.741.881.578,00	745.196.437.547,00	(231.545.444.031,00)	76,29
2.2.1	Belanja Tanah	53.876.297.000,00	50.090.020.982,00	(3.786.276.018,00)	92,97
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	119.342.560.740,00	107.245.373.964,00	(12.097.186.776,00)	89,86
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	294.175.419.712,00	110.102.466.904,00	(184.072.952.808,00)	37,43
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	455.075.218.135,00	431.284.438.850,00	(23.790.779.285,00)	94,77
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	54.272.385.991,00	46.474.136.847,00	(7.798.249.144,00)	85,63
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER	494.011.157.000,00	458.324.463.100,00	(35.686.693.900,00)	92,78
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	494.011.157.000,00	458.324.463.100,00	(35.686.693.900,00)	92,78
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	49.909.000.000,00	28.866.134.500,00	(21.042.865.500,00)	57,84
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	16.157.925.000,00	6.855.994.500,00	(9.301.930.500,00)	42,43
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	427.944.232.000,00	422.602.334.100,00	(5.341.897.900,00)	98,75
	SURPLUS / (DEFISIT)	(304.160.718.100,00)	(2.034.879.686,00)	302.125.838.414,00	0,67
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	315.160.718.100,00	315.160.718.100,00	0,00	100,00
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	315.160.718.100,00	315.160.718.100,00	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	11.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	22,73
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(8.500.000.000,00)	22,73
	PEMBIAYAAN NETTO	304.160.718.100,00	312.660.718.100,00	8.500.000.000,00	102,79
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	310.625.838.414,00	310.625.838.414,00	0,00



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		REALISASI				JUMLAH	(Rp)	(%)
		JENIS BELANJA						
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	273.560.505.432,00	986.477.813.961,00	918.577.512.249,00	2.178.615.831.642,00	(285.902.831.896,00)	86,88	
1.01	Pendidikan	256.114.753.334,00	939.687.127.206,00	696.911.119.206,00	1.892.712.999.746,00	(6.329.997.161,00)	98,40	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	124.235.780.379,00	188.164.611.556,00	84.436.312.065,00	396.836.704.000,00	(6.321.196.661,00)	98,41	
1.01 . 1.01.01 . 01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	112.175.064.546,00	204.482.996.478,00	73.848.645.815,00	390.506.706.839,00	(6.321.196.661,00)	98,41	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124.235.780.379,00	187.813.461.556,00	84.436.312.065,00	396.485.554.000,00	(6.321.196.661,00)	98,41	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	993.730.000,00	1.096.163.050,00	592.836.550,00	2.682.729.600,00	(160.042.461,00)	94,03	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 01		952.388.000,00	978.201.139,00	592.098.000,00	2.522.687.139,00	(9.885.000,00)	91,91	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	122.200.000,00	0,00	122.200.000,00	(96.970.661,00)	66,07	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0,00	112.315.000,00	0,00	112.315.000,00	(3.282.000,00)	99,23	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	426.240.000,00	460.000,00	0,00	426.700.000,00	(316.250,00)	99,69	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	423.418.000,00	0,00	0,00	423.418.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	100.909.050,00	0,00	100.909.050,00	(230.000,00)	99,77	
		0,00	100.592.800,00	0,00	100.592.800,00			
		0,00	130.400.000,00	0,00	130.400.000,00			
		0,00	130.400.000,00	0,00	130.400.000,00			
		0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00			
		0,00	99.770.000,00	0,00	99.770.000,00			



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
01	PELAYANAN UMUM	1.047.973.474.874,00	957.353.426.871,00	(90.620.048.003,00)	91,35
01 2 03	Pangan	9.770.030.832,00	9.268.217.018,00	(501.813.814,00)	94,86
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	13.916.790.430,00	13.328.363.094,00	(588.427.336,00)	95,77
01 2 14	Statistik	670.000.000,00	668.520.000,00	(1.480.000,00)	99,78
01 2 18	Kearsipan	815.767.000,00	807.099.000,00	(8.668.000,00)	98,94
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	879.857.223.950,00	800.528.705.637,00	(79.328.518.313,00)	90,98
01 4 02	Pengawasan	8.064.750.000,00	7.749.147.017,00	(315.602.983,00)	96,09
01 4 03	Perencanaan	15.702.494.546,00	14.993.764.938,00	(708.729.608,00)	95,49
01 4 04	Keuangan	108.336.418.116,00	99.673.217.493,00	(8.663.200.623,00)	92,00
01 4 05	Kepegawaian	10.840.000.000,00	10.336.392.674,00	(503.607.326,00)	95,35
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	52.631.016.092,00	50.154.294.202,00	(2.476.721.890,00)	95,29
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	52.631.016.092,00	50.154.294.202,00	(2.476.721.890,00)	95,29
04	EKONOMI	219.869.044.223,00	183.158.420.821,00	(36.710.623.402,00)	83,30
04 2 01	Tenaga Kerja	31.220.099.878,00	28.273.305.906,00	(2.946.793.972,00)	90,56
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	24.425.800.160,00	23.348.621.270,00	(1.077.178.890,00)	95,59
04 2 09	Perhubungan	22.591.867.866,00	20.533.918.849,00	(2.057.949.017,00)	90,89
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.224.675.264,00	9.754.368.918,00	(470.306.346,00)	95,40
04 2 12	Penanaman Modal	13.789.764.845,00	13.423.216.654,00	(366.548.191,00)	97,34
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	15.175.903.422,00	11.712.278.665,00	(3.463.624.757,00)	77,18
04 3 03	Pertanian	74.122.604.635,00	55.366.010.034,00	(18.756.594.601,00)	74,70
04 3 05	Energi dan Sumberdaya Mineral	6.246.500.000,00	33.715.000,00	(6.212.785.000,00)	0,54
04 3 06	Perdagangan	3.649.000.000,00	3.458.634.150,00	(190.365.850,00)	94,78
04 3 07	Perindustrian	18.006.358.153,00	16.838.411.375,00	(1.167.946.778,00)	93,51
04 3 08	Transmigrasi	416.470.000,00	415.940.000,00	(530.000,00)	99,87
05	LINGKUNGAN HIDUP	57.518.516.586,00	51.102.869.801,00	(6.415.646.785,00)	88,85
05 2 04	Pertanahan	1.446.489.000,00	1.361.063.600,00	(85.425.400,00)	94,09
05 2 05	Lingkungan Hidup	56.072.027.586,00	49.741.806.201,00	(6.330.221.385,00)	88,71

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.148.990.703.335,00	1.062.586.720.992,00	(86.403.982.343,00)	92,48
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	995.409.519.312,00	914.606.544.603,00	(80.802.974.709,00)	91,88
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	153.581.184.023,00	147.980.176.389,00	(5.601.007.634,00)	96,35
07	KESEHATAN	753.065.428.422,00	550.171.143.061,00	(202.894.285.361,00)	73,06
07 1 02	Kesehatan	732.545.977.316,00	530.496.182.382,00	(202.049.794.934,00)	72,42
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.519.451.106,00	19.674.960.679,00	(844.490.427,00)	95,88
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	25.560.076.467,00	24.086.976.637,00	(1.473.099.830,00)	94,24
08 2 16	Kebudayaan	24.157.576.467,00	22.704.522.637,00	(1.453.053.830,00)	93,99
08 3 02	Pariwisata	1.402.500.000,00	1.382.454.000,00	(20.046.000,00)	98,57
10	PENDIDIKAN	1.269.644.124.079,00	1.214.847.029.222,00	(54.797.094.857,00)	95,68
10 1 01	Pendidikan	1.257.708.639.873,00	1.203.305.435.450,00	(54.403.204.423,00)	95,67
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	5.838.020.000,00	5.833.009.000,00	(5.011.000,00)	99,91
10 2 17	Perpustakaan	6.097.464.206,00	5.708.584.772,00	(388.879.434,00)	93,62
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	56.659.784.450,00	53.403.704.518,00	(3.256.079.932,00)	94,25
11 1 06	Sosial	28.776.757.690,00	27.142.059.043,00	(1.634.698.647,00)	94,32
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.295.980.756,00	8.095.725.292,00	(200.255.464,00)	97,59
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Capil	19.587.046.004,00	18.165.920.183,00	(1.421.125.821,00)	92,74
JUMLAH		4.631.912.168.528,00	4.146.864.586.125,00	(485.047.582.403,00)	89,53



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited)
Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.2	315.160.718.100,00	468.468.549.635,26
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		315.160.718.100,00	468.468.549.635,26
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		310.625.838.414,00	315.160.718.100,00
Sub Total		310.625.838.414,00	315.160.718.100,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir		310.625.838.414,00	315.160.718.100,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN OPERASIONAL (Audited)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	4.3.1	3.966.150.738.783,78	4.048.344.115.790,99	(82.193.377.007,21)	(2,03)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.3.1.1	1.437.568.281.314,24	1.128.847.428.831,99	308.720.852.482,25	27,35
Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.3.1.1.1	800.469.665.791,96	762.703.671.903,43	37.765.993.888,53	4,95
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.3.1.1.2	76.409.479.877,58	60.952.088.565,00	15.457.391.312,58	25,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.3.1.1.3	8.301.178.628,00	13.883.218.876,00	(5.582.040.248,00)	(40,21)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	4.3.1.1.4	552.387.957.016,70	291.308.449.487,56	261.079.507.529,14	89,62
PENDAPATAN TRANSFER - LO	4.3.1.2	2.510.586.008.830,00	2.568.213.985.984,00	(57.627.977.154,00)	(2,24)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	4.3.1.2.1	2.017.808.510.547,00	1.959.371.891.794,00	58.436.618.753,00	2,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	4.3.1.2.2	53.444.647.000,00	200.286.996.655,00	(146.842.349.655,00)	(73,32)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	4.3.1.2.3	389.512.419.283,00	343.679.970.535,00	45.832.448.748,00	13,34
Bantuan Keuangan - LO	4.3.1.2.4	49.820.432.000,00	64.875.127.000,00	(15.054.695.000,00)	(23,21)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	4.3.1.3	17.996.448.639,54	351.282.700.975,00	(333.286.252.335,46)	(94,88)
Pendapatan Hibah - LO	4.3.1.3.1	17.996.448.639,54	351.120.273.801,00	(333.123.825.161,46)	(94,87)
Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	4.3.1.3.1	0,00	162.427.174,00	(162.427.174,00)	0,00
BEBAN	4.3.2	3.457.033.966.978,60	4.170.086.306.544,58	(713.052.339.565,98)	(17,10)
BEBAN OPERASI	4.3.2.1	3.248.442.008.478,60	3.759.405.984.954,58	(510.963.976.475,98)	(13,59)
Beban Pegawai	4.3.2.1.1	1.404.919.205.727,00	1.453.626.220.963,00	(48.707.015.236,00)	(3,35)
Beban Persediaan	4.3.2.1.2	566.351.341.214,92	792.633.340.660,45	(226.281.999.445,53)	(28,55)
Beban Jasa	4.3.2.1.3	827.710.323.086,04	831.945.716.743,36	(4.235.393.657,32)	(0,51)
Beban Pemeliharaan	4.3.2.1.4	73.461.243.190,00	87.689.230.025,38	(14.227.986.835,38)	(16,23)
Beban Perjalanan Dinas	4.3.2.1.5	95.355.125.720,00	80.273.012.079,00	15.082.113.641,00	18,79
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	4.3.2.1.6	38.094.559.800,00	69.183.822.000,00	(31.089.262.200,00)	(44,94)
Beban Bantuan Sosial	4.3.2.1.7	23.418.520.000,00	18.865.300.000,00	4.553.220.000,00	24,14
Beban Penyusutan	4.3.2.1.8	186.600.405.754,31	235.557.018.385,47	(48.956.612.631,16)	(20,78)
Beban Amortisasi	4.3.2.1.9	1.480.067.959,00	1.390.339.084,00	89.728.875,00	6,45
Beban Penyisihan Piutang	4.3.2.1.10	30.927.276.384,33	188.241.985.013,92	(157.314.708.629,59)	(83,57)
Beban Lain-lain	4.3.2.1.11	123.939.643,00	0,00	123.939.643,00	0,00
BEBAN TRANSFER	4.3.2.2	208.591.958.500,00	410.680.321.590,00	(202.088.363.090,00)	(49,21)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		28.866.134.500,00	21.713.690.000,00	7.152.444.500,00	32,94
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		6.855.994.500,00	3.648.187.000,00	3.207.807.500,00	87,93
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		171.725.551.500,00	384.174.166.590,00	(212.448.615.090,00)	(55,30)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		1.144.278.000,00	1.144.278.000,00	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI		509.116.771.805,18	(121.742.190.753,59)	630.858.962.558,77	(518,19)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.3.2.3				

URAIAN	Ref	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		7.537.984.298,78	4.216.855.354,99	3.321.128.943,79	78,76
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(7.537.984.298,78)	(4.216.855.354,99)	(3.321.128.943,79)	78,76
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		501.578.787.506,40	(125.959.046.108,58)	627.537.833.614,98	(498,21)
POS LUAR BIASA	4.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa - LO		89.993.750,00	0,00	89.993.750,00	0,00
Beban Luar Biasa		229.506.647.995,85	48.091.461,00	229.458.556.534,85	477.129,52
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(229.416.654.245,85)	(48.091.461,00)	(229.368.562.784,85)	476.942,39
SURPLUS/DEFISIT-LO		272.162.133.260,55	(126.007.137.569,58)	398.169.270.830,13	(315,99)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)
Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2017	2016
EKUITAS AWAL	4.4.1	4.187.963.574.849,08	4.163.083.047.837,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	4.4.2	272.162.133.260,55	(126.007.137.569,58)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	4.4.3		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya :		(66.378.398.756,61)	150.887.664.581,16
a. Koreksi Perubahan Kebijakan Akuntansi		0,00	-
b. Koreksi Pencatatan		(66.378.398.756,61)	150.887.664.581,16
EKUITAS AKHIR		4.393.747.309.353,02	4.187.963.574.849,08

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2017	2016
ASET	4.5.1		
ASET LANCAR	4.5.1.1		
Kas di Kas Daerah	4.5.1.1.1.1	268.780.197.125,00	263.654.037.556,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.1.1.1.2	257.800.000,00	453.319.637,00
Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.1.1.1.3	364.248.210,00	134.748.000,00
Kas di BLUD	4.5.1.1.1.4	23.306.236.636,00	30.702.991.979,00
Kas Lainnya	4.5.1.1.1.5	18.150.581.771,00	23.195.474.804,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak	4.5.1.1.2.1	491.802.717.062,80	467.024.824.579,80
Penyisihan Piutang Pajak		(352.008.706.463,98)	(321.639.302.258,20)
Piutang Pajak Netto		139.794.010.598,82	145.385.522.321,60
Piutang Retribusi	4.5.1.1.2.2	1.550.455.523,00	867.886.583,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(694.249.068,00)	(499.915.359,50)
Piutang Retribusi Netto		856.206.455,00	367.971.223,50
Piutang Lainnya	4.5.1.1.2.3	56.548.176.057,26	21.686.899.745,56
Penyisihan Piutang Lainnya		(2.486.279.117,02)	(2.336.454.242,97)
Piutang lainnya Netto		54.061.896.940,24	19.350.445.502,59
Belanja Dibayar Dimuka	4.5.1.1.4	615.363.925,20	456.000.654,82
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	4.5.1.1.3	965.005.949,67	759.442.349,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		965.005.949,67	759.442.349,00
Persediaan	4.5.1.1.5	95.585.055.910,42	46.015.258.356,05
Jumlah Aset Lancar		602.736.603.521,35	530.475.212.383,56
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen	4.5.1.2.1		
Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara		0,00	0,00
Investasi Nonpermanen Lainnya		12.331.384.027,35	4.476.087.050,35
Penyisihan Investasi Non Permanen		(7.979.236.620,00)	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		4.352.147.407,35	4.476.087.050,35
Investasi Permanen	4.5.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		91.825.024.030,38	90.145.541.404,35
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		91.825.024.030,38	90.145.541.404,35
Jumlah Investasi Jangka Panjang		96.177.171.437,73	94.621.628.454,70
ASET TETAP	4.5.1.3		
Tanah	4.5.1.3.1	1.097.788.374.819,20	1.094.508.712.204,20
Peralatan dan Mesin	4.5.1.3.2	817.366.284.623,30	794.021.391.200,95
Gedung dan Bangunan	4.5.1.3.3	1.287.862.523.758,35	1.374.442.809.872,95
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.5.1.3.4	2.923.546.014.615,07	2.651.692.523.607,10
Aset Tetap Lainnya	4.5.1.3.5	60.939.023.511,70	65.959.950.760,97
Konstruksi dalam Pengerjaan	4.5.1.3.6	120.880.704.990,00	45.237.666.340,00
Akumulasi Penyusutan	4.5.1.3.7	(2.678.236.868.910,92)	(2.546.577.611.953,70)
Jumlah Aset Tetap		3.630.146.057.406,70	3.479.285.442.032,47

Uraian	Ref	2017	2016
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	4.5.1.4		
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi	4.5.1.4.1	175.163.958,33	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi Netto		175.163.958,33	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.5.1.4.2	32.965.646.159,00	32.965.646.159,00
Aset Tak Berwujud	4.5.1.4.3	17.390.846.052,00	12.009.539.302,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud		(7.838.103.658,50)	(6.358.035.699,50)
Aset Tak Berwujud Netto		9.552.742.393,50	5.651.503.602,50
Aset Lain-Lain	4.5.1.4.4	117.331.168.419,04	120.485.875.415,37
Jumlah Aset Lainnya		160.024.720.929,87	159.103.025.176,87
JUMLAH ASET		4.489.084.553.295,65	4.263.485.308.047,60
KEWAJIBAN	4.5.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.5.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.5.2.1.1	233.225.328,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4.5.2.1.2	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.5.2.1.3	11.730.602.196,03	12.737.766.496,57
Utang Belanja	4.5.2.1.4	10.394.947.595,00	6.893.714.826,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.5.2.1.5	72.978.468.823,60	55.890.251.875,95
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		95.337.243.942,63	75.521.733.198,52
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Premium (Diskonto) Obligasi		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		95.337.243.942,63	75.521.733.198,52
JUMLAH EKUITAS	4.5.3	4.393.747.309.353,02	4.187.963.574.849,08
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.489.084.553.295,65	4.263.485.308.047,60

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


 BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	4.6.1		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pajak Daerah		774.945.849.107,00	633.184.029.350,00
Penerimaan Retribusi Daerah		75.484.056.978,00	61.367.353.222,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.301.178.628,00	13.883.218.876,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		539.288.278.403,00	294.594.670.624,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		196.117.848.601,00	242.841.564.183,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		120.949.158.440,00	123.385.057.605,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.239.740.020.000,00	1.250.725.634.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		461.001.483.506,00	342.419.636.006,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		308.426.264.000,00	200.286.996.655,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		367.174.105.666,00	343.679.970.535,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Hibah		3.290.431.110,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya		49.820.432.000,00	64.875.127.000,00
<i>Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		4.144.539.106.439,00	3.571.243.258.056,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		1.623.608.604.759,00	1.619.915.095.681,00
Pembayaran Barang		1.257.077.722.919,00	1.023.295.854.643,26
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		38.094.559.800,00	69.183.822.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial		23.418.520.000,00	18.865.300.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		423.746.612.100,00	385.318.444.590,00
Pembayaran Tak Terduga		0,00	48.091.461,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		28.866.134.500,00	21.713.690.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		6.855.994.500,00	3.648.187.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
<i>Pembayaran Kejadian Luar Biasa</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		3.401.668.148.578,00	3.141.988.485.375,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		742.870.957.861,00	429.254.772.680,74
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	4.6.2		
Arus Masuk Kas			
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	151.779.999,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		30.500.000,00	31.000.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		260.100.000,00	179.841.300,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>		0,00	0,00
<i>Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen</i>		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		290.600.000,00	362.621.299,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		50.090.020.982,00	23.800.046.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		107.245.373.964,00	117.669.104.040,00

URAIAN	Ref	2017	2016
Perolehan Gedung dan Bangunan		110.102.466.904,00	76.816.848.625,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		431.284.438.850,00	350.464.634.050,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		46.474.136.847,00	5.424.592.800,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>		2.500.000.000,00	8.750.000.000,00
<i>Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen</i>		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		747.696.437.547,00	582.925.225.515,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(747.405.837.547,00)	(582.562.604.216,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	4.6.3		
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<i>Pencairan Dana Cadangan</i>		0,00	0,00
<i>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>		0,00	0,00
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggaran	4.6.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		240.825.163.242,00	231.653.764.474,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		240.825.163.242,00	231.653.764.474,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		240.825.163.242,00	231.653.764.474,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		240.825.163.242,00	231.653.764.474,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(4.534.879.686,00)	(153.307.831.535,26)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		315.160.718.100,00	468.468.549.635,26
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran		268.804.771.797,00	264.107.357.193,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		364.248.210,00	134.748.000,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		23.306.236.636,00	30.702.991.979,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara kapitasi		16.807.944.901,00	20.215.620.928,00
Saldo Akhir Kas Di Bendahara BOS		1.342.636.870,00	0,00
Saldo Akhir Kas		310.625.838.414,00	315.160.718.100,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 (AUDITED)**

Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

4.1.1 PENDAPATAN

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2017 sebesar Rp4.327.751.450.428,00 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017, Perbup No. 48 tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Karawang TA 2017 serta Perbup No. 51 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Karawang TA 2017. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp4.144.829.706.439,00 atau 95,77 % dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1
Pendapatan
Periode sampai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
PENDAPATAN	4.327.751.450.428,00	4.144.829.706.439,00	95,77	3.571.605.879.355,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.485.641.325.512,00	1.398.309.963.116,00	94,12	1.003.391.893.371,00
Pendapatan Pajak Daerah	857.460.900.000,00	774.945.849.107,00	90,38	633.184.029.350,00
Pendapatan Retribusi Daerah	100.185.470.200,00	75.484.056.978,00	75,34	61.367.353.222,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.163.449.000,00	8.301.178.628,00	101,69	13.883.218.876,00
Lain-lain PAD yang sah	519.831.506.312,00	539.578.878.403,00	103,80	294.957.291.923,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.779.261.954.916,00	2.693.408.880.213,00	96,91	2.503.338.858.984,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	2.110.523.128.900,00	2.017.808.510.547,00	95,61	1.959.371.891.794,00
Dana Bagi Hasil Pajak	251.865.730.814,00	196.117.848.601,00	77,87	242.841.564.183,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	133.723.035.086,00	120.949.158.440,00	90,45	123.385.057.605,00
Dana Alokasi Umum	1.239.740.020.000,00	1.239.740.020.000,00	100,00	1.250.725.634.000,00
Dana Alokasi Khusus	485.194.343.000,00	461.001.483.506,00	95,01	342.419.636.006,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	308.974.674.000,00	308.426.264.000,00	99,82	200.286.996.655,00

4.6.2 Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2017 defisit sebesar (Rp747.405.837.547,00). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp290.600.000,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp747.696.437.547,00 merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp745.196.437.547,00 dan penyertaan Modal Pemerintah daerah Rp2.500.000.000,00

4.6.3 Aktivitas Pembiayaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2017 adalah Nihil.

4.6.4 Aktivitas Non Anggaran

Saldo Arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Nihil mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas non anggaran dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

- Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	Rp240.825.163.242,00
- Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	(Rp240.825.163.242,00)
Jumlah	0,00

Berikut Tabel penerimaan dan pengeluaran PFK melalui SP2D

No	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	45.663.835.493,00	45.663.835.493,00
2	Taperum	1.140.278.000,00	1.140.278.000,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	57.911.885.375,00	57.911.885.375,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	1.612.925.597,00	1.612.925.597,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	524.877.878,00	524.877.878,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	18.543.893.259,00	18.543.893.259,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	103.304.767.896,00	103.304.767.896,00
8	Taspen	13.827.622,00	13.827.622,00
9	Lainnya	16.467.906,00	16.467.906,00
10	Pajak Daerah - Restoran	636.324.081,00	636.324.081,00
11	Iuran Wajib Pegawai 2%	11.446.280.135,00	11.446.280.135,00
12	Pajak Daerah Hotel	9.800.000,00	9.800.000,00

Saldo akhir kas di BUD jika dijumlahkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Puskesmas, Kas di BLUD dan Kas pada Bendahara BOS menjadi saldo akhir kas sebesar Rp310.625.838.414,00.



BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN RINCIAN PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Hotel	2005 s/d 2013	120.256.550,00	-	-	120.256.550,00
2	Piutang Pajak Restoran	2005 s/d 2013	381.358.229,00	-	-	381.358.229,00
3	Piutang Pajak Hiburan	2005 s/d 2012	107.753.523,00	-	-	107.753.523,00
4	Piutang Pajak Reklame	2006 s/d 2017	1.280.177.813,00	8.027.542.398,00	8.027.542.398,00	1.280.177.813,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2005 s/d 2017	17.151.698.114,00	-	16.988.148.756,00	163.549.358,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	s/d 2013	4.015.472,00	-	-	4.015.472,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	2005 s/d 2009	13.020.000,00	-	-	13.020.000,00
8	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	2010 s/d 2017	2.154.102.231,80	4.588.113.423,00	5.128.762.322,00	1.613.453.332,80
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	s/d 2017	445.812.442.647,00	236.719.527.356,00	194.412.837.218,00	488.119.132.785,00
10	Piutang Retribusi	s/d 2017	867.886.583,00	1.571.887.250,00	889.318.310,00	1.550.455.523,00
11	Piutang Klaim RSUD	2017	19.813.792.224,56	29.385.335.799,26	19.813.792.224,56	29.385.335.799,26
12	Piutang DPM LUEP	2017	351.470.550,00	-	189.761.860,00	161.708.690,00
13	Bagian Lancar Piutang Kemitraan	2017	2.645.666.288,00	1.975.000.000,00	297.666.290,00	4.322.999.998,00
14	Piutang Denda	2016	324.118.283,00	-	-	324.118.283,00
15	Piutang Kapitasi Puskesmas	2017	-	15.699.670,00	-	15.699.670,00
16	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2017	-	22.338.313.617,00	-	22.338.313.617,00
	JUMLAH		491.027.758.508,36	304.621.419.513,26	245.747.829.378,56	549.901.348.643,06


 BUPATI KARAWANG,
 CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	JENIS PIUTANG	TAHUN PENGAKUAN PIUTANG	SALDO PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
1	2	3	4	5	6(4-5)
1	Piutang Pajak Hotel	2005 s/d 2013	120.256.550,00	120.256.550,00	-
2	Piutang Pajak Restoran	2005 s/d 2013	381.358.229,00	381.033.229,00	325.000,00
3	Piutang Pajak Hiburan	2005 s/d 2012	107.753.523,00	107.753.523,00	-
4	Piutang Pajak Reklame	2006 s/d 2017	1.280.177.813,00	885.509.063,00	394.668.750,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2005 s/d 2017	163.549.358,00	161.378.378,00	2.170.980,00
6	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	s/d 2013	4.015.472,00	2.007.736,00	2.007.736,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	2005 s/d 2009	13.020.000,00	13.020.000,00	-
8	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	2010 s/d 2017	1.613.453.332,80	728.724.632,44	884.728.700,36
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	s/d 2017	488.119.132.785,00	349.609.023.352,54	138.510.109.432,46
10	Piutang Retribusi	s/d 2017	1.550.455.523,00	694.249.068,00	856.206.455,00
11	Piutang Klaim RSUD	2017	29.385.335.799,26	2.000.452.144,02	27.384.883.655,24
12	Piutang DPM LUEP	2017	161.708.690,00	161.708.690,00	-
13	Bagian Lancar Piutang Kemitraan	2017	4.322.999.998,00	-	4.322.999.998,00
14	Piutang Denda	2016	324.118.283,00	324.118.283,00	-
15	Piutang Kapitasi Puskesmas	2017	15.699.670,00	-	15.699.670,00
16	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2017	22.338.313.617,00	-	-
	JUMLAH		549.901.348.643,06	355.189.234.649,00	172.373.800.377,06

BUPATI KARAWANG,

 CELLICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	SKPD	URAIAN	TAHUN PENGAKUAN DANA BERGULIR	SALDO DANA BERGULIR	PENYISIHAN DANA BERGULIR	NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	Koperasi UKM	Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM	2003 s.d 2008	5.994.209.000,00	5.994.209.000,00	-
2	BPMD	Dana PPK Phase II Dana APBD (Matching Grant)	2006 s.d 2017	1.337.175.027,35	353.696.920,00	983.478.107,35
3	Sekretariat Daerah	Investasi PEM pada PD BPR dan PT LKM	2007 s.d 2017	5.000.000.000,00	1.631.330.700,00	3.368.669.300,00



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
PER 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

No	Tahun penyertaan modal	Nama Badan/Lembaga/ Pi hak ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Rp	Jumlah Penyertaan Modal yang telah disertakan s/d awal tahun Rp	Jumlah Penyertaan Modal Tahun ini Rp	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini Rp	Sisa Modal yang belum disertakan Rp	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) tahun ini *) Rp	Jumlah Modal (Investasi) yang Diterima Kembali Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =7+8	10 = 6-9	11	13
1	1987 s.d 2010	Bank bjb		Sahan	13.579.661.000	13.579.661.000		13.579.661.000	-	4.834.359.316	
2	s.d 2017	PD. BPR. BKPD Cilamaya	Perda Kab. Karawang no 13 th 2012 tentang PD BPR Kab. Karawang	Tunai	8.250.000.000	4.248.402.582	2.000.000.000	6.248.402.582	2.001.597.418	214.604.652	-
3	s.d 2017	PT. LKM KARAWANG	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro	Tunai	12.600.000.000	6.450.000.000	500.000.000	6.950.000.000	5.650.000.000	-	-
4	s.d 2016	PDAM KARAWANG	Perda Kab. Karawang no 6 tahun 2010 tentang PDAM Tirta Tarum Kab. Karawang	Tunai dan Fisik	150.000.000.000	56.369.019.218	-	56.369.019.218	93.630.980.782	3.252.214.660	-
5	2003	PD PETROGAS PI	Perda Kab. Karawang no 12 tahun 2003 tenteng Pembentukan PD Petrogas Persada Karawang	Tunai	15.000.000.000	955.000.000	-	955.000.000	14.045.000.000	-	-
6	2003	PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang	Perda Kab. Karawang no 11 tahun 2003 tenteng Pembentukan PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang	Tunai	10.500.000.000	705.000.000	-	705.000.000	9.795.000.000	-	-
7	2003	PD AGRO PERSA	Perda Kab. Karawang no 10 tahun 2003 tenteng Pembentukan PD Agro Persada Karawang	Tunai	10.500.000.000	705.000.000	-	705.000.000	9.795.000.000	-	-
8	2004	Lumbung Desa Modern		Tunai	275.000.000	275.000.000	-	275.000.000	-	-	-
		JUMLAH			220.704.661.000	83.287.082.800	2.500.000.000	85.787.082.800	134.917.578.200	8.301.178.628	-



BUPATI KARAWANG

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	1.094.508.712.204,20	53.406.076.082,00	50.126.413.467,00	1.097.788.374.819,20
2	Peralatan dan Mesin	794.021.391.200,95	117.785.376.392,85	94.440.482.970,50	817.366.284.623,30
3	Gedung dan Bangunan	1.374.442.809.872,95	120.629.161.731,54	207.209.447.846,14	1.287.862.523.758,35
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.651.692.523.607,10	440.331.077.599,00	168.477.586.591,03	2.923.546.014.615,07
5	Aset Tetap lainnya	65.959.950.760,97	48.669.493.297,42	53.690.420.546,69	60.939.023.511,70
6	Konstruksi dalam pengerjaan	45.237.666.340,00	75.643.038.650,00	-	120.880.704.990,00
	JUMLAH	6.025.863.053.986,17	856.464.223.752,81	573.944.351.421,36	6.308.382.926.317,62

BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XIII ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

PER 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Tanah	Peralatan/Mesin	Gedung/Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	75.653.736.568,00	124.789.693.306,71	753.552.970.286,12	3.261.630.717,00	32.427.934.613,49		989.685.965.491,32
2	Dinas Kesehatan	23.991.316.929,00	100.646.815.716,62	90.977.548.315,96	1.141.366.400,00	48.823.000,00		216.805.870.361,58
3	RSUD	169.089.046.991,00	154.642.425.058,80	10.930.836.658,00	1.757.672.000,00	5.730.000,00	19.196.982.000,00	355.622.692.707,80
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	408.743.612.249,20	37.912.244.801,00	15.531.157.200,00	2.791.956.472.385,49	2.817.709.000,00	74.854.487.650,00	3.331.815.683.285,69
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	51.598.682.227,00	14.166.716.952,16	159.835.043.677,90	69.619.557.531,58	21.144.801.534,21	26.472.623.600,00	342.837.425.522,85
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	800.000,00	2.825.950.105,00	5.427.745.000,00	-	350.000,00		8.254.845.105,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	11.070.000,00	4.232.914.825,00	1.702.036.050,00	39.055.000,00	-		5.985.075.875,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	14.676.723.260,00	129.948.000,00	-	-		14.806.671.260,00
9	Dinas Sosial	3.747.594.000,00	3.785.812.800,00	2.578.108.400,00	-	-		10.111.515.200,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.917.046.200,00	10.674.485.143,00	9.133.258.000,00	59.520.000,00	188.430.000,00		27.972.739.343,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	1.831.949.000,00	-	-	-		1.831.949.000,00
12	Dinas Pangan	-	2.748.235.420,00	144.033.000,00	-	-		2.892.268.420,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	50.736.486.589,01	3.004.413.500,00	5.532.371.000,00	20.637.175,00		59.293.908.264,01
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.865.011.514,00	10.747.635.561,00	1.051.748.300,00	-	1.475.000,00		13.665.870.375,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.868.851.871,00	5.260.416.959,00	3.053.569.500,00	188.430.000,00	56.500.000,00		12.427.768.330,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	845.292.960,00	10.138.851.749,00	5.852.513.000,00	123.800.500,00	-		16.960.458.209,00
17	Dinas Perhubungan	1.142.897.500,00	13.169.585.777,00	12.056.357.620,00	976.847.250,00	22.086.500,00	145.507.000,00	27.513.281.647,00
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	3.768.556.689,00	573.095.000,00	-	-		4.341.651.689,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	358.847.250,00	2.515.265.375,00	524.965.928,00	-	-		3.399.078.553,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6.027.492.285,00	-	-	-		6.027.492.285,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	22.718.012.900,00	9.051.879.962,00	24.272.252.072,00	3.327.919.000,00	1.897.000.750,00	36.135.000,00	61.303.199.684,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.686.000,00	6.952.716.045,00	3.046.048.150,00	147.990.750,00	781.527.764,00		10.944.968.709,00
23	Dinas Perikanan	5.963.200.579,00	10.367.038.806,00	14.524.057.389,00	2.393.970.300,00	558.982.000,00	174.969.740,00	33.982.218.814,00
24	Dinas Pertanian	17.873.604.230,00	11.148.659.668,00	16.982.076.163,00	-	-		46.004.340.061,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.520.123.821,00	12.615.691.875,00	23.538.249.701,00	557.012.000,00	-		90.231.077.397,00
26	Sekretariat Daerah	19.805.773.274,00	107.449.022.851,00	27.802.954.820,00	42.244.909.281,00	889.749.875,00		198.192.410.101,00
27	Sekretariat DPRD	1.255.284.000,00	18.545.923.820,00	17.249.699.400,00	76.700.000,00	36.337.450,00		37.163.944.670,00
28	Kecamatan Karawang Barat	1.698.658.270,00	3.375.332.646,00	10.042.702.947,37	3.591.000,00	-		15.120.284.863,37
29	Kecamatan Pangkalan	23.555.000,00	621.502.327,00	1.111.557.000,00	-	1.450.000,00		1.758.064.327,00
30	Kecamatan Telukjambe Timur	38.620.000,00	679.776.558,00	1.013.627.400,00	-	-		1.732.023.958,00
31	Kecamatan Ciampel	7.500.000,00	752.301.000,00	556.946.000,00	-	-		1.316.747.000,00
32	Kecamatan Klari	399.859.200,00	945.052.960,00	1.522.320.200,00	-	1.200.000,00		2.868.432.360,00
33	Kecamatan Rengasdengklok	10.061.692.000,00	824.415.719,00	4.104.026.940,00	-	-		14.990.134.659,00

NO	SKPD	Tanah	Peralatan/Mesin	Gedung/Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
34	Kecamatan Kutawaluya	96.498.000,00	759.357.857,00	1.798.148.000,00	-	-		2.654.003.857,00
35	Kecamatan Batujaya	365.000.000,00	686.260.157,00	3.990.129.000,00	-	732.000,00		5.042.121.157,00
36	Kecamatan Tirtajaya	743.000.000,00	610.968.816,00	1.479.473.000,00	-	-		2.833.441.816,00
37	Kecamatan Pedes	30.000.000,00	584.241.800,00	1.147.231.000,00	-	200.000,00		1.761.672.800,00
38	Kecamatan Cibuaya	10.800.000,00	600.629.200,00	900.263.400,00	-	-		1.511.692.600,00
39	Kecamatan Pakisjaya	28.430.000,00	689.975.252,00	901.006.400,00	-	-		1.619.411.652,00
40	Kecamatan Cikampek	284.981.760,00	675.236.927,00	2.718.143.900,00	-	-		3.678.362.587,00
41	Kecamatan Jatisari	427.770.000,00	803.044.932,00	3.092.208.000,00	-	-		4.323.022.932,00
42	Kecamatan Cilamaya Wetan	33.342.000,00	802.680.686,00	2.846.409.000,00	-	-		3.682.431.686,00
43	Kecamatan Tirtamulya	35.000.000,00	654.507.200,00	1.311.024.000,00	-	-		2.000.531.200,00
44	Kecamatan Telagasari	6.581.250,00	566.129.660,00	2.346.247.000,00	-	-		2.918.957.910,00
45	Kecamatan Rawamerta	933.583.000,00	755.408.250,00	3.447.372.000,00	-	-		5.136.363.250,00
46	Kecamatan Lemahabang	219.021.000,00	953.138.178,00	5.154.973.000,00	-	-		6.327.132.178,00
47	Kecamatan Tempuran	25.500.000,00	600.265.536,00	1.150.792.000,00	-	-		1.776.557.536,00
48	Kecamatan Majalaya	550.873.536,00	664.254.257,00	1.557.313.000,00	-	-		2.772.440.793,00
49	Kecamatan Jayakarta	30.000.000,00	558.800.800,00	1.288.474.000,00	-	-		1.877.274.800,00
50	Kecamatan Cilamaya Kulon	699.445.001,00	569.610.558,00	1.562.294.500,00	-	4.000.000,00		2.835.350.059,00
51	Kecamatan Banyusari	201.689.000,00	691.544.425,00	1.257.828.500,00	-	-		2.151.061.925,00
52	Kecamatan Kotabaru	600.630.000,00	984.586.958,00	4.445.637.000,00	4.000.000,00	-		6.034.853.958,00
53	Kecamatan Karawang Timur	10.894.972.250,00	2.575.419.975,00	6.810.386.600,00	64.700.000,00	-		20.345.478.825,00
54	Kecamatan Telukjambe Barat	693.990.022,00	676.977.007,00	2.026.931.500,00	-	-		3.397.898.529,00
55	Kecamatan Tegalwaru	792.830.123,00	573.944.225,00	2.847.603.500,00	-	-		4.214.377.848,00
56	Kecamatan Purwasari	365.412.937,00	592.895.700,00	2.195.998.500,00	-	-		3.154.307.137,00
57	Kecamatan Cilebar	214.020.007,00	649.296.471,00	2.216.442.500,00	-	-		3.079.758.978,00
58	Inspektorat	344.850.000,00	4.308.323.600,00	1.982.261.340,00	30.250.000,00	15.470.600,00		6.681.155.540,00
59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	6.019.924.440,00	1.331.715.000,00	10.180.000,00	200.000,00		7.362.019.440,00
60	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.916.083.400,00	10.534.568.493,00	4.102.713.500,00	-	17.696.250,00		211.571.061.643,00
61	Badan Pendapatan Daerah	-	13.267.711.801,00	-	-	-		13.267.711.801,00
62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	27.696.000,00	6.329.009.853,00	127.639.000,00	28.069.500,00	-		6.512.414.353,00
	JUMLAH	1.097.788.374.819,20	817.366.284.623,30	1.287.862.523.758,35	2.923.546.014.615,07	60.939.023.511,70	120.880.704.990,00	6.308.382.926.317,62



 BUPATI KARAWANG,

 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

No.	JENIS	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Gedung/Bangunan	38.130.698.790,00	61.271.176.250		99.401.875.040,00
2	Jalan, Jaringan, Irigasi	7.106.967.550	14.064.992.100		21.171.959.650,00
3	Aset Tetap Lainnya		306.870.300		306.870.300,00
	JUMLAH	45.237.666.340,00	75.643.038.650,00	-	120.880.704.990,00


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6
1	Tuntutan ganti rugi	0	175.163.958,33		175.163.958,33
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	32.965.646.159,00	0		32.965.646.159,00
3	Aset Tidak Berwujud	5.651.503.602,50	3.901.238.791,00		9.552.742.393,50
4	Aset Lain-lain	120.485.875.415,37		3.154.706.996,33	117.331.168.419,04
	JUMLAH	159.103.025.176,87	4.076.402.749,33	3.154.706.996,33	160.024.720.929,87



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam rupiah)

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan	Saldo awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2	NIHIL							
3								
4								
5								
JUMLAH								


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	233.225.328,00	-	233.225.328,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	12.737.766.496,57	11.623.778.038,20	12.630.942.338,74	11.730.602.196,03
3	Utang Beban	6.893.714.826,00	10.394.947.595,00	6.893.714.826,00	10.394.947.595,00
4	RSUD	20.735.957.457,00	14.275.473.782,20	20.735.957.457,00	14.275.473.782,20
5	Dinas PUPR	25.415.672.994,00	39.276.719.550,00	19.744.761.200,00	44.947.631.344,00
6	Dinas PRKP	7.843.356.488,95	4.136.705.216,66	5.979.865.834,21	6.000.195.871,40
7	Dinas LHK	63.235.300,00	399.888.000,00	-	463.123.300,00
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.984.500,00	-	-	4.984.500,00
9	Sekretariat Daerah	355.643.950,00	-	-	355.643.950,00
10	Sekretariat DPRD	11.776.950,00	83.820.000,00	-	95.596.950,00
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	101.365.550,00	-	-	101.365.550,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	323.354.500,00	89.340.650,00	323.354.500,00	89.340.650,00
13	Dinas Kesehatan	1.034.904.186,00	1.969.414.326,00	1.016.904.186,00	1.987.414.326,00
14	Bapenda	-	4.455.000,00	-	4.455.000,00
15	Penyaluran Dana Desa	-	4.653.243.600,00	-	4.653.243.600,00
	TOTAL	75.521.733.198,52	87.141.011.086,06	67.325.500.341,95	95.337.243.942,63

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XI X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

(dalam rupiah)

NO	KODE KEGIATAN	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir TA n	Jumlah Yang dianggarkan dalam APBD Tahun berikutnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8
1	Pembangunan Rumah Sakit Paru	1			164.441.500,00	164.441.500,00	153.198.242.650,00
JUMLAH							153.198.242.650,00



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

KABUPATEN KARAWANG
 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN,
 DAN LABA (RUGI) BERSIH
 TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam rupiah)

No.	Perusahaan Daerah Tahun	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah	Metode Penilaian Investasi
1	2	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18 = 16 x 17	19
I Bidang Perbankan dan LKM																
1	Bank Jabar Cab. Karawang			-											13.579.661.058,00	Metode Biaya
2	PD BPR-BKPD Cilamaya	19.005.110.000,00	147.672.000,00	15.868.000,00	19.168.650.000,00	12.441.508.000,00	-	12.441.508.000,00	5.148.403.000,00	-	606.828.000,00	971.911.000,00	6.727.142.000,00	82,52%	5.551.237.578,40	Metode Ekuitas
3	PT LKM	19.501.173.969,00	589.410.963,00	93.241.717,00	20.183.826.649,00	12.930.208.914,00	-	12.930.208.914,00	10.500.000.000,00	-	(4.050.409.396,00)	804.027.132,00	7.253.617.736,00	61,43%	4.455.897.375,22	Metode Ekuitas
II Bidang Pelayanan Air Minum																
4	PDAM Karawang	36.238.453.001,17	108.740.016.221,64	1.289.425.153,00	146.267.894.375,81	7.663.491.380,86	12.990.562.300,00	20.654.053.680,86	103.941.076.205,00	-	21.672.764.489,95	-	125.613.840.694,95	54,23%	68.122.529.212,76	Metode Ekuitas
III Bidang Perdagangan																
5	PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang			-	-	-	-	-	705.000.000,00			(698.275.000,00)	6.725.000,00	100%	6.725.000,00	Metode Ekuitas
IV Bidang Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi																
6	PD Petrogas Persada	-	-	-	-	-	-	-	955.000.000,00	-	(955.000.000,00)	-	-	100%	-	Metode Ekuitas
V Bidang Pertanian																
7	PD Agro Persada			-	-	-	-	-	705.000.000,00	-	(705.000.000,00)	-	-	100%	-	Metode Ekuitas
8	Lumbung Desa Modern	-	-	-	-	-	-	-	275.000.000,00			(166.026.194,00)	108.973.806,00	100%	108.973.806,00	Metode Ekuitas
Total Seluruh Bidang															91.825.024.030,58	

BUPATI KARAWANG,
 CELLIKA NURRACHADIANA